

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU:

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Cetakan I, 2004

Adji, Indriyanto Seno. *Kuhap Dalam Prospektif*, Cetakan I, Diadit Media Jakarta, 2011.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana. Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008.

Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Cetakan kesebelas, Jakarta, 2009.

Loqman, Loebby. *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan I, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.

Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Edisi Pertama*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Cetakan II, Jakarta, 1997

Prodjodikiro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Sumur, Bandung, 1973

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Edisi I*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2003

Supomo, R. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan 16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Pres, cetakan I, Jakarta, 2008

Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung

2. JURNAL:

Packer. Herbert L., *Two Models of Criminal Process. source: Reprinted from The Limits of The Criminal Sanction by Herbert L. Packer, with the permission of the publishers, Stanford University Press, 1968.*

Strang. Robert R., *More Adversarial but not Completely Aversarial: Reformasi of Indonesian Criminal Procedure*, The Berkely Electronic Press, 2008.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

———. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

———. Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (2010-2012).

4. INTERNET:

“Hakim Pemeriksa Pendahuluan Belum Tawarkan Solusi”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51828a83c75cf/hakim-pemeriksa-pendahuluan-belum-tawarkan-solusi>

“Menahan Tersangka, Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51665dd4d9028/menahan-tersangka--kewenangan-hakim-pemeriksa-pendahuluan>

“Wamenkumham: Hakim Komisaris Bukan Untuk Melemahkan KPK”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52694866aab07/wamenkumham--hakim-komisaris-bukan-untuk-melemahkan-kpk>

“Masih Pentingnya Mendorong Kosep Hakim Komisaris”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21203/masih-pentingnya-mendorong-konsep-hakim-komisaris---->

“Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia”

<<http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf>

“Buyung: Tidak Perlu Ada Hakim Komisaris”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9001/buyung-tidak-perlu-ada-hakim-komisaris>

“Hakim Komisaris Masih Terus Diperdebatkan”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18142/hakim-komisaris-masih-terus-diperdebatkan>

“Polri Bersikukuh Tolak Hakim Komisaris”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf5c1caba175/polri-bersikukuh-tolak-hakim-komisaris>

“Deponir Tidak Masuk Ruang Lingkup Praperadilan”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16619/deponir-tidak-masuk-ruang-lingkup-praperadilan->

“MK Cabut Aturan Banding Praperadilan”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9ff3cb4fbf8/mk-cabut-aturan-banding-praperadilan>

“Lagi, Hakim Perluas Objek Praperadilan”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cd2decce98cf/hakim-perluas-objek-praperadilan->

